



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NASRUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **729514**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.462.000.000**

1. Tanah Seluas 424 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 212.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/208 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/154 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 601.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI FAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO CW Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.



9.000.000

6. MOTOR, HONDA VARIO CW Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 125.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 91.739.099

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.280.239.099

III. HUTANG

Rp. 125.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.155.239.099

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.